



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025



LAPORAN KINERJA

KPKNL TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
(1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA**

19 Februari 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	5
C. Aspek Strategis KPKNL Tasikmalaya.....	5
D. Isu Strategis.....	7
E. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Adendum Kontrak Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1. Perbandingan Target Awal Tahun Dan Realisasi Kinerja 2025.....	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan:	
a Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi	16
b Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.....	18
3. Upaya-Upaya <i>Extra Effort</i> Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.....	21
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	23

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).....	29
7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja.....	29
8. Pencapaian Target IKU, Prinsip GEDSI.....	29
9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih. Sekolah Rakyat. Dll.....	30
10. Rencana Aksi Ke-Depan.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	31
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
D. Kinerja Lain-Lain (Penghargaan).....	36
BAB IV PENUTUP	37
Lampiran Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Format 1, 2 dan 3	

PENGANTAR

Pertanggungjawaban pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya selama tahun 2025 dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 53/2014).

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 116,31%. Dari capaian tersebut, sebagian besar IKU pada dasarnya telah mencapai target. Hasil capaian tersebut tentunya kami jadikan motivasi agar semakin baik lagi di tahun berikutnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Tasikmalaya, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang diharapkan atau mendeteksi kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan setiap tugas.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan KPKNL Tasikmalaya selalu dilandaskan pada visi yang telah ditetapkan yaitu : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”.

Menjadi yang terbaik adalah harapan yang selalu terus akan diusahakan untuk dicapai yang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan harapan yang ada dan terjadi pada masyarakat. Perwujudan untuk menjadi yang terbaik dalam Tahun 2025 dilaporkan dalam Laporan Kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025 guna memberikan pertanggungjawaban atas visi dan misi yang telah diemban.

Tasikmalaya, 19 Februari 2026

Plh Kepala KPKNL Tasikmalaya



Ditandatangani secara elektronik

Dede Fakhruddin



RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 116,31%

18 Total IKU	
17	1
Capain Nilai Kinerja Organisasi 2025	
Stakeholder Perspective (30%)	111,55%
Customer Perspective (20%)	115,04%
Internal process (25%)	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)	119,34%
NKO Q4 2025	116,31%

Pencapaian Kinerja KPKNL Tasikmalaya dalam mengelola kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang disajikan melalui Laporan Kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Tasikmalaya yang disusun pada tahun 2025 berisikan capaian kinerja selama periode tahun 2025, sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPKNL Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sarana Prasarana

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Struktur Organisasi KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdiri dari :



Gambar Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya

Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor.

Kekuatan Sebagai Sumber Daya Manusia yang Ada

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPKNL Tasikmalaya per 31 Desember 2025 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

	Laki-Laki	Perempuan	Total
Golongan I	0	0	0
Golongan II	1	1	2
Golongan III	12	9	21
Golongan IV	3	0	3
Jumlah	16	10	26

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon				
			II	III	IV	Jafung	Pelaksana
1	SD	1	-	-	-	-	1
2	DI/DIII	3	-	-	-	-	3
4	DIV/S1	16	-	-	2	5	9
5	S2	6	-	1	2	1	2
Total		26	-	1	4	6	14

Kelompok Jabatan Fungsional KPKNL Tasikmalaya

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang Ahli Muda	3
2	Pelelang Ahli Pertama	1
3	Penilai Pemerintah Ahli Muda	1
4	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	1
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	1

KPKNL Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Tasikmalaya dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut:

i	Kepala Kantor	:	1 (satu) pegawai
ii	Subbagian Umum	:	4 (empat) pegawai
iii	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	:	4 (empat) pegawai
iii	Seksi Piutang Negara	:	4 (empat) pegawai
iv	Seksi Hukum dan Informasi	:	4 (empat) pegawai
v	Seksi Kepatuhan Internal	:	2 (dua) pegawai
vi	Jabatan Fungsional Pelelang	:	4 (empat) pegawai
vii	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	:	2 (dua) pegawai
viii	Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN	:	1 (satu) pegawai

2. Sarana dan Prasarana

Sarana berupa sebidang tanah berdirinya gedung kantor bertingkat yang cukup representatif dengan luas 2.053 m² tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, setempat dikenal dengan Jalan Ir H Juanda No 19, Tasikmalaya. Gedung kantor bertingkat dengan luas sekitar 2.000 m² yang didukung prasarana lain seperti gedung bangunan tempat ibadah 70 m² dan bangunan kantor tidak bertingkat 10 m² sebagai kantin pegawai dan pengguna jasa layanan APT. Selain itu, KPKNL Tasikmalaya juga memiliki tanah seluas 572 m² yang berasal dari penyerahan KPP Pratama Tasikmalaya berikut 2 (dua) buah bangunan rumah negara dan 1 (satu) buah bangunan mess yang pada tahun 2016 lalu telah direnovasi. Tanah tersebut terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan, terletak di Jalan Pancasila, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya. Adapun prasarana yang ada antara lain adalah:

No	Jenis Peralatan/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 2	3	3	-	-
2	Kendaraan Roda 2 Listrik Berbasis Baterai	4	4	-	-
3	Kendaraan Roda 4	4	4	-	-
4	Komputer dan Laptop	50	40	5	5

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

C. Aspek Strategis

Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan merupakan implementasi sekaligus antisipasi dalam menghadapi dinamika perkembangan organisasi. Pada cetak biru transformasi kelembagaan tersebut, aspek strategis DJKN meliputi inisiatif strategis dalam fungsi perbendaharaan dan fungsi special mission. Fungsi perbendaharaan atau fungsi pengelolaan kekayaan Negara meliputi kegiatan penilaian, inventarisasi dan pengelolaan kekayaan Negara. Sedangkan special mission merujuk pada fungsi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagai instrument investasi pemerintah. Pada level KPKNL, aspek strategis dalam fungsi perbendaharaan lebih berperan. Aspek strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Tasikmalaya sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager, KPKNL Tasikmalaya mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen penerbitan SUKUK.

Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), efisiensi belanja negara, dan implementasi program Asta Cita. Titik berat kegiatan pengelolaan kekayaan negara adalah memberikan kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum. Optimalisasi ini juga sejalan dengan

konsep pengelolaan aset agar tidak ada aset yang menganggur (idle), melainkan bekerja keras (asset as a revenue center) untuk memberikan nilai tambah.

2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Tasikmalaya di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran Strategis KPKNL Tasikmalaya di bidang piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari piutang instansi pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai Penyerah Piutang di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Eks BPPN
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Kementerian Keuangan Cq. Ditjen Perbendaharaan Cq. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI cq. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
- Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
- Pemerintah Kabupaten Garut cq. PT. Bank BIJ Garut
- Pemerintah Kabupaten Garut cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Syariah, Tbk. Cabang Tasikmalaya
- RSUD dr Slamet Kabupaten Garut
- RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
- Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang
- Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis KPKNL Tasikmalaya di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (stake holder). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang eksekusi maupun non eksekusi sebagai sarana jual beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik

berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Tasikmalaya sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Tasikmalaya memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Tasikmalaya juga turut berperan menyumbang PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.


D. Isu Strategis

1. Tata kelola BMN terkait Perubahan nomenklatur & penambahan kementerian/lembaga perlu diperkuat.
2. Optimasi pemanfaatan BMN guna mendukung penerimaan negara & sebagai bukti kehadiran negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan kualitas layanan lelang untuk mewujudkan lelang Indonesia sebagai sarana penjualan yang andal.
4. Ekosistem proses bisnis yang terintegrasi.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Tasikmalaya tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Perencanaan Kinerja
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV. Penutup



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja diperlukan untuk Menentukan arah kegiatan dan mengukurtingkat keberhasilan kinerja organisasi. Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka ditetapkanlah misi KPKNL Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

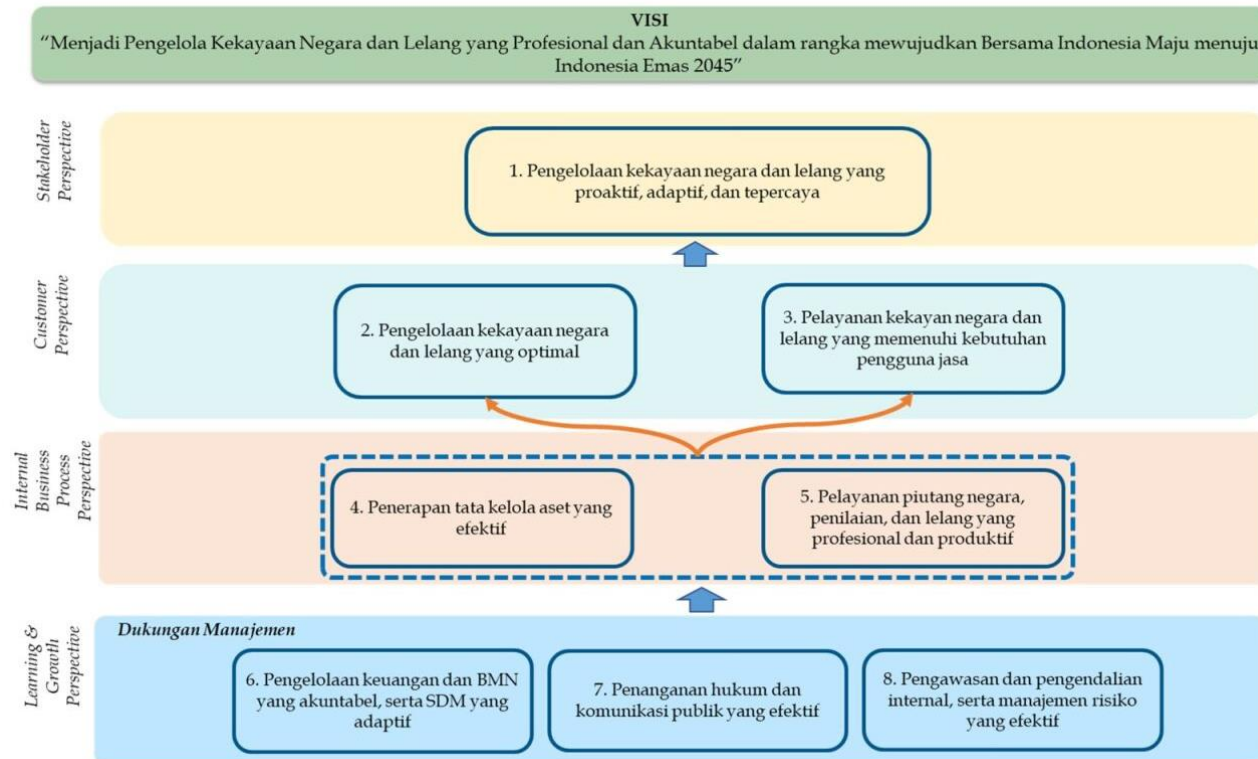
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tasikmalaya telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Peta Strategis KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025

Peta Strategi



Peta strategi KPKNL menetapkan 4 perspektif, yaitu :

1. Stakeholder Perspective, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder;
2. Customer Perspective, berisi ekspektasi dari customer/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan;
3. Internal Process Perspective, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan; dan

4. Learning and Growth Perspective, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategi KPKNL tahun 2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 18 (delapan belas) IKU. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Tasikmalaya tahun 2025 adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS DAN IKU

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Stakeholder Perspektif (30%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100,00
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%
Customer Perspektif (20%)				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	77
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	74
Internal Process Perspective (25%)				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipatkan	100,00%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100,00%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70,00%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%
Learning and Growth Perspective				

6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00

Adendum IKU pada tanggal 17 November 2025

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-05 A/WKN.08/2025

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-05/WKN.08/2025 tanggal 30 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp5,0 M)	2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp5,4 M)
2.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100 (41)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100 (50,2)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

		Sebelum							Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
2b-CP	Persentase realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2b-CP	Persentase realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	penurunan nilai saldo piutang negara							(Rp 5,0 M)		penurunan nilai saldo piutang negara							(Rp5,4 M)
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (41)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (50,2)

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya tanggal 30 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2b-CP	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp5,0 M)	<i>Penerima Layanan</i>
5a-CP	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat)	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100 (41)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2b-CP	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp5,4 M)	<i>Penerima Layanan</i>
5a-CP	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat)	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100 (50,2)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (Rp5,0 M)	2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (Rp5,4 M)
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (41)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (50,2)



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/rencana dengan capaian/realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tasikmalaya tahun 2024 adalah 116,31%. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 116,30%

18 Total IKU	
17	1
Capain Nilai Kinerja Organisasi 2025	
Stakeholder Perspective (30%)	111,55%
Customer Perspective (20%)	115,04%
Internal process (25%)	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)	119,34%
NKO Q4 2025	116,31%

Sebagaimana telah disebutkan pada BAB II, sesuai dengan addendum pada tahun 2025, KPKNL Tasikmalaya telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, sebanyak 17 IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi \geq 100%) dan hanya 1 (satu) IKU yang berstatus kuning sehingga NKO 2025 KPKNL Tasikmalaya tercapai 116,31%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspektif (30%)					33,46%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100,00	105,32%
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	153,16%
Customer Perspektif (20%)					23,01
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	121,18%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	92,85%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	120,68%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	77	99,40
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	74	94,84
Internal Process Perspektive (25%)					30,00%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	138,37%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100,00%	150,60%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70,00%	96,08%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	104,50%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Max. 120	No
Learning and Growth Perspektive						29,84%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	120,00	120,00%
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	98,00%	120,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	116,05	120,00%
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80,00	116,00	120,00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	96,85	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						116,31%

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan penyajian data capaian kinerja dan nilai kinerja (sebagaimana terlampir pada lampiran format 1 dan 2)
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
 - a. rencana kerja Kemenkeu Tahun 2025 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rentra DJKN, sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJM DJKN	Renja Kemenkeu
Stakeholder Perspektif (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	105,32%	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	153,16%	Rasion PNBPN (2,11% PDB)
Customer Perspektif (20%)					

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target RPJM DJKN	Renja Kemenkeu
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	121,18%	100%	Indeks Pengelolaan Aset 3 (skala 4)
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	92,85%	100%	
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	120,68%	100%	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	99,40	100	-
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	94,84 / 4,97	4,2	4,2
Internal Process Perspective (25%)						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	138,37%	100%	Indeks Pengelolaan Aset 3 (skala 4)
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	120,00%	100%	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	150,60%	100%	Indeks Pengelolaan Aset 3 (skala 4)
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	96,08%	70%	
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	104,50%	80%	
Learning and Growth Perspective						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	120,00	100	86 (Indeks Efektivitas kebijakan belanja Negara)
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	120,00	100	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target RPJM DJKN	Renja Kemenkeu
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	98,00%	-	-
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	116,05	100	-
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	116,00	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	96,85	-	-
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				116,31%		

b. Capaian Kinerja Kurun Waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya :

PNBP Pengelolaan BMN

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2023	2.550.000.000,00	3.243.336.350,00	127,19%
2	2024	2.831.900.000,00	4.436.466.592,00	156,66%
3	2025	4.700.000.000,00	6.003.473.525,00	127,73%

PNBP BEA Lelang

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2021	Rp.2.239.000.000,00	Rp.2.427.123.439,00	108,40%
2	2022	Rp.2.500.000.000,00	Rp.2.646.298.671,00	108,85%
3	2023	Rp.2.891.000.000,00	Rp.2.792.066.204,00	96,58%
4	2024	Rp.2.891.000.000,00	Rp.5.687.995.179,00	196,75%
5	2025	Rp.2.805.328.333,00	Rp.5,495,785,377 ,00	195,91%

POKOK Lelang

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2021	Rp.58.000.000.000,00	Rp.88.851.241.809,00	153,19%
2	2022	Rp.56.100.000.000,00	Rp.80.723.133.330,00	143,89%
3	2023	Rp.94.455.000.000,00	Rp.84.884.680.636,00	89,87%
4	2024	Rp.94.455.000.000,00	Rp.147.590.190.014,00	156,25%
5	2025	Rp.154.373.500.000,00	Rp.143.334.844.626,00	92,85%

BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2021	Rp.89.000.000,00	Rp.90.367.154,00	101,54%
2	2022	Rp.10.025.000,00	Rp.10.179.455,00	101,95%
3	2023	Rp.10.050.000,00	Rp.15.075.402,00	150,00%
4	2024	Rp.15.075.402,00	Rp.11.268.829,00	101,93%
5	2025	Rp.11.300.000,00	Rp.13.118.837,00	116,10%

PIUTANG NEGARA YANG DAPAT DISELESAIKAN (PNDS)

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2021	Rp.1.238.777.221,00	Rp.1.584.959.935,00	127,95%
2	2022	Rp.929.082.916,00	Rp.2.825.823.476,00	304,15%
3	2023	Rp.2.300.000.000,00	Rp.2.714.737.608,0	118,03%
4	2024	Rp.5.000.000.000,00	Rp.6.334.504.687,24	126,69%
5	2025	Rp.5.470.302.000,00	Rp.6.601.753.900,00	120,68%

BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2021	1.075	1.155	107,44%
2	2022	1.080	1.102	102,04%
3	2023	1.200	1.319	109,92%
4	2024	426	180	42,25%
5	2025	50	68	135,46%

3. Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Upaya
Stakeholder Perspektif (30%1.			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan para pejabat dan pelaksana di lingkungan DJKN untuk mengikuti pelatihan penguatan integritas dan pencegahan korupsi; 2. Campaign/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di lingkungan DJKN; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja; 4. Penerbitan naskah dinas pimpinan unit kerja yang memuat imbauan pengendalian gratifikasi dan penegasan agar tidak menjamu pimpinan secara berlebihan; 5. Diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN; 6. Melaksanakan evaluasi program "Tali Kasih" khususnya terkait proses penyaluran/penggunaan dana dan efektivitas dampak program kepada pihak yang membutuhkan;

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Upaya
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	Pembinaan/workshop/Sharing Session untuk meningkatkan kapasitas entitas Pengadaan Barang/Jasa. (Bukti tinjau disampaikan melalui tautan bit.ly/TLSPI2024_DJKN)
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Koordinasi dengan satuan kerja/instansi yang terkait dengan PNBP BMN, PN dan Lelang
Customer Perspektif (20%)				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Koordinasi dengan satuan kerja target optimalisasi.
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	1. Sosialisasi 2. Koordinasi dengan stakeholder
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Koordinasi dengan stakeholder
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Koordinasi dengan stakeholder
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Koordinasi dengan stakeholder
Internal Process Perspektif (25%)				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	Koordinasi dengan stakeholder
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Koordinasi dengan stakeholder
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Koordinasi dengan stakeholder
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Koordinasi dengan stakeholder

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Koordinasi dengan stakeholder
Learning and Growth Perspektive				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Koordinasi dengan stakeholder
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Koordinasi dengan stakeholder
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Koordinasi dengan stakeholder
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Koordinasi dengan stakeholder
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Koordinasi dengan stakeholder
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Koordinasi dengan stakeholder

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, sebanyak 17 IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi \geq 100%) dan hanya 1 (satu) IKU yang berstatus kuning atau belum tercapai. Seluruh pegawai setiap unit telah berupaya maksimal untuk mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan untuk 18 IKU yang ada khususnya yang dalam kendalinya. Terdapat 1 IKU yaitu Persentase realisasi pokok lelang yang hanya tercapai 92,85% dari target 100%. Hal ini dikarenakan Realisasi pokok lelang pengadaan cukup jauh dari target Desember 2025. Alternatif solusi yang telah dilakukan ialah Koordinasi dengan stakeholder lelang baik itu pihak pengadaan, pemohon lelang, dan masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Uraian		Belanja				Ket
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	-	-	-	-	Melaksanakan rencana aksi sesuai time line. Koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01%	SPPNL sebanyak 8, Surat Paksa 56. SPS 1, SPPBS 9, PB 9, SP3N 78, dan PSBDT 60 berkas terbit
			Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam penggalian potensi lelang
			Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL	39.714.000	34.049.900	85,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL	39.714.000	34.049.900	85,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL Produk PSP 90, Persetujuan Pemindahtanganan /Penghapusan 36, Persetujuan Pemanfaatan/Sewa 41

No	Uraian		Belanja				Ket
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL	14.092.000	11.313.500	80,28%	Wasdal - disampaikan 247 dari 205 nup, ditinjau 144 dari target 11
		Persentase realisasi pokok lelang	Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam penggalian potensi lelang
			Risalah Lelang	12.271.000	12.269.000	99,98%	Telah terbit 2.580 Penetapan Jadwal Lelang, 215 Risalah Lelang
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01%	SPPNL sebanyak 8, Surat Paksa 56. SPS 1, SPPBS 9, PB 9, SP3N 78, dan PSBDT 60 berkas terbit
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam penggalian potensi lelang
			Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01%	SPPNL sebanyak 8, Surat Paksa 56. SPS 1, SPPBS 9, PB 9, SP3N 78, dan PSBDT 60 berkas terbit
		Indeks kepuasan pengguna layanan	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01%	SPPNL sebanyak 8, Surat Paksa 56. SPS 1, SPPBS 9, PB 9, SP3N 78, dan PSBDT 60 berkas terbit

No	Uraian		Belanja				Ket
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	
3	Pelayanan keadilan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam penggalian potensi lelang
			Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL	39.714.000	34.049.900	85,74%	Sudah 6 Kali berkoordinasi langsung dalam Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL Produk PSP 90, Persetujuan Pemindahtanganan /Penghapusan 36, Persetujuan Pemanfaatan/Sewa 41
			Survei Lapangan dan Penilaian	62.308.000	61.080.451	98,03%	104 Laporan Penilaian telah dilaksanakan melalui survei lapangan. Norma waktu layanan penilaian 90,45, Akurasi data layanan penilaian 100, dan nilai kaji ulang minimal 85 dari 32 laporan dengan capaian 100
			Komunikasi Publik dan Kehumasan	14.412.000	12.716.200	88,23%	Informasi Publik melalui website telah rutin setiap triwulan dan berkala di update sesuai arahan. Permohonan informasi public sebanyak 1 register telah diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja. Konten strategi komunikasi telah disampaikan sesuai jumlah tema dan jadwal yang ditetapkan.

No	Uraian		Belanja				Ket
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	Rekomendasi BMN berupa Tanah yang disertipikatkan	12.743.000	12.277.500	96,35%	Sertifikasi 339 dari 245 target bidang
		Persentase evaluasi kinerja BMN	Rekomendasi hasil kajian portofolio aset	22.116.000	19.878.000	89,88%	SBSK 17 dari 17 nup target
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01%	SPPNL sebanyak 8, Surat Paksa 56. SPS 1, SPPBS 9, PB 9, SP3N 78, dan PSBDT 60 berkas terbit
		Tingkat kualitas layanan penilaian	Survei Lapangan dan Penilaian	62.308.000	61.080.451	98,03%	104 Laporan Penilaian telah dilaksanakan melalui survei lapangan. Norma waktu layanan penilaian 90,45, Akurasi data layanan penilaian 100, dan nilai kaji ulang minimal 85 dari 32 laporan dengan capaian 100
			Rekomendasi Hasil Penilaian - DKPB dan Survei Basis Data Penilaian	18.040.000	17.258.000	95,61%	DKPB telah disurvei dan ditetapkan sesuai batas waktu.
		Persentase produktivitas lelang	Risalah Lelang	12.271.000	12.269.000	99,98%	Telah terbit 2.580 Penetapan Jadwal Lelang, 215 Risalah Lelang

No	Uraian		Belanja				Ket
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	Pengelolaan, Keuangan, BMN dan Umum	2.192.566.000	2167552233	98,86%	Nilai IKPA 120, Nilai Perencanaan Anggaran/NKPA 100, Penyerapan Anggaran >97%, dan Sumber Daya 100
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa					
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai					
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	Legislasi dan Litigasi	25.344.000	24.127.000	95,20%	72 berkas gugatan perdata, selesai/inkrah 25 berkas gugatan.
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Komunikasi Publik dan Kehumasan	14.412.000	12.716.200	88,23%	Informasi Publik melalui website telah rutin setiap triwulan dan berkala di update sesuai arahan. Permohonan informasi public sebanyak 1 register telah diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja.

No	Uraian		Belanja				
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10.703.000	10.501.759	98,12%	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, sebanyak 17 IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi \geq 100%) dan hanya 1 (satu) IKU yang berstatus kuning atau belum tercapai. Seluruh pegawai setiap unit telah berupaya maksimal untuk mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan untuk 18 IKU yang ada khususnya yang dalam kendalinya. Terdapat 1 IKU yaitu Persentase realisasi pokok lelang yang hanya tercapai 92,85% dari target 100%. Hal ini dikarenakan Realisasi pokok lelang pengadaan cukup jauh dari target Desember 2025. Alternatif solusi yang telah dilakukan ialah Koordinasi dengan stakeholder lelang baik itu pihak pengadaan, pemohon lelang, dan masyarakat.

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko meliputi serangkaian tindakan proaktif dan terencana untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko hingga ke tingkat yang dapat diterima (residual). Hal ini dilakukan pada semua sasaran strategi dan iku yang akan ada pada tahun 2026. Strategi ini melibatkan pendekatan sistematis seperti menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko guna melindungi tujuan organisasi. Mitigasi risiko yang baik bertujuan untuk meminimalkan kerugian, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keberlangsungan bisnis.

8. Dalam pencapaian target IKU, prinsip GEDSI yang diterapkan antara lain:

- a. Seluruh pegawai di KPKNL Tasikmalaya dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
- b. APT KPKNL Tasikmalaya dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
- c. Proses bisnis KPKNL Tasikmalaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

- 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih. Sekolah Rakyat. DII**
KPKNL Tasikmalaya telah melaksanakan penilaian bangunan dapur SPPG pada daerah terpencil di Kabupaten Garut melalui tim penilaian, mengadakan cek kesehatan gratis seluruh pegawai dengan langsung mengadakannya di kantor, dan ikut mensosialisasikannya melalui postingan media sosial terkait program prioritas presiden.

10. Rencana Aksi kedepan

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

Bidang PKN

- Meningkatkan sinergi dengan satuan kerja dalam pengelolaan BMN;
- Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
- Melakukan Bimbingan Teknik kepada Satuan Kerja yang memiliki Target SBSK;
- Melakukan evaluasi atas capaian NUP termasuk penyusunan mitigasi risiko cepat yang dapat dilakukan.
- Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
- Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
- Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja.
- Penggalan Potensi PNBPN pada satuan kerja;
- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi target sertifikasi BMN
- berupa tanah beserta Kantor Pertanahan terkait;
- Menyampaikan surat kepada satuan kerja terkait target sertifikasi dan meminta
- dokumen untuk persiapan pensertifikatan BMN berupa tanah.
- Mengadakan sosialisasi di bidang kekayaan negara yang salah satunya terkait pengukuran kinerja asset;
- Pendampingan pada satuan kerja yang menjadi target portofolio BMN

Bidang Piutang Negara

- Berkoordinasi dengan satuan kerja dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
- Penggalan Potensi PNBPN pada satuan kerja;
- Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022 dan aturan PN lainnya);

Bidang Lelang

- Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
- Penggalan potensi lelang stakeholder dan Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang.

Bidang Penilaian

- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dalam pelaksanaan penilaian;

- Mengadakan sosialisasi kepada satuan kerja terkait permohonan penilaian dan ketentuan lainnya

Bidang SDM, Anggaran, dan TURT

- memberikan early warning dan RPD pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA.
- penginputan data secara teliti atas pencatatan data pada Dropbox.

Bidang Hukum dan Kehumasan/Informasi

- Menyiapkan dokumen yang akan disajikan pada informasi publik;
- Menghadiri sidang perkara perdata dan menyampaikan produk setiap tahan sidang;
- Mempelajari daftar informasi publik yang dikecualikan.

Bidang Kepatuhan Internal

- Koordinasi informasi dengan PIC di Sekretariat DJKN terkait progress kegiatan SPI tahun 2026;
- Mengikuti pelaksanaan FGD.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPKNL Tasikmalaya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

1. Penyerapan Anggaran

Pagu Netto DIPA KPKNL Tasikmalaya tahun anggaran 2025 adalah sebesar 2.585.025.000, dengan rincian belanja barang sebesar 2.173.896.000 dan belanja modal sebesar 411.129.000. Realisasi belanja s.d. Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan berbasis akrual (transaksi di SAKTI):

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.173.896.000	2.133.207.229	98,13%
2	Belanja Modal	411.129.000	402.284.000	97,85%
	Total	2.585.025.000	2.535.491.229	98,08%

2. Realisasi Penyerapan berbasis Kas (transaksi yang sudah SP2D di OMSPAN):

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.173.896.000	2.133.207.229	98,13%
2	Belanja Modal	411.129.000	402.284.000	97,85%
	Total	2.585.025.000	2.535.491.229	98,08%

3. Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Tasikmalaya sebagai berikut:
 Capaian IKI Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKI IKKPA) Capaian IKI Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. bulan Desember 2025 adalah sebesar 120% dari target 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Indikator IKI	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)			100,00
1. Revisi DIPA	100	10	10
2. Deviasi Hal III DIPA	100	10	10
3. Penyerapan Anggaran	100	20	20
4. Belanja Kontraktual	100	10	10
5. Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6. Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7. Dispensasi SPM	100	5	5
8. Capaian Output	100	25	25
B) Nilai SMART (Bobot 50%)			100
1. Capaian Rincian Output	100	75%	75
2. Penggunaan SBK	100	10%	10
3. Efisiensi SBK	100	15%	15
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Desember 2025			100
Target IKI IKKPA			100,00
Realisasi IKI IKKPA s.d. Desember 2025			100,00
Indeks Capaian Kinerja IKI IKKPA s.d. Desember 2025			120,00%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) TA 2025 Satuan Kerja KPKNL Tasikmalaya mencapai 100. Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian variabel efektivitas dan efisiensi. Nilai ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Aspek kualitas perencanaan anggaran dalam IKPA menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran

dengan yang direncanakan. Aspek ini mencakup dua indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA. Variabel yang dinilai dalam perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran adalah:

- Efektivitas, yang dinilai dari capaian RO, capaian Sasaran Program, dan capaian Sasaran Strategis

1. Efisiensi, yang dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU. Data Rincian Output.

No	Rincian Output	Uraian RO	Anggaran (Rp)		Nilai Capaian		
			Usulan Pagu Akhir	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)	Nilai (%)
1	AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	22,284,000	-	56	56	100.00
2	AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	8,766,000	-	22	22	100.00
3	AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	5,624,000	-	15	15	100.00
4	AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	103,680,000	95,130,351	50	50	100.00
5	AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	85,356,000	75,226,000	500	500	100.00
6	ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	24,448,000	19,878,000	205	205	100.00
7	BAH.001	Risalah Lelang	12,271,000	12,269,000	600	600	100.00
8	FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	14,592,000	11,313,500	1	1	100.00
9	FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	19,040,000	17,248,000	2	2	100.00
10	FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	42,318,000	20,316,000	2	2	100.00

11	FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	61,992,000	57,280,000	11	11	100.00
12	UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan	17,706,000	12,277,500	130	130	100.00
13	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	25,344,000	24,127,000	4	4	100.00
14	EBA.002	Kerumahtanggaan	72,724,000	60,069,072	12	12	100.00
15	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,895,888,000	1,705,199,161	12	12	100.00
16	EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	210,874,000	139,367,999	5	5	100.00
17	EBB.002	Kendaraan Bermotor	56,000,000	52,500,001	2	2	100.00
18	EBB.003	Gedung/Bangunan	2,613,528,000	210,416,000	220	220	100.00
19	BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	9,862,000	1,982,200	30	30	100.00
20	BMB.002	Kehumasan	21,024,000	10,734,000	4	4	100.00
21	EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	21,406,000	10,501,759	5	5	100.00
Jumlah			5,344,727,000	2,535,835,543			100.00

2. Data Penggunaan SBK

No	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Volume RO s.d. 31 Desember 2025	Indeks Realisasi Anggaran	Penggunaan SBK	Keterang Nilai Efisiensi Per RO (%)
1	4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	SBKK	18,252,000	11,313,500	2	5,656,750	Ya	20.00
2	4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	SBKK	30,012,000	17,248,000	2	8,624,000	Ya	20.00
3	4798.FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	SBKK	30,000,000	20,316,000	2	10,158,000	Ya	20.00
4	4798.UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	SBKK	1,408,000	12,277,500	186	66,008	Ya	20.00

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Capain Rincian Output	100%	75.00%	75.00
2	Penggunaan SBK	100%	10.00%	10.00
3	Efisiensi SBK	100%	15.00%	15.00
Capaian NKPA				100.00

4. Penggunaan Sumber Daya


Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Tasikmalaya dalam rangka pembinaan dikepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2025, disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai ASN : 26 orang
2. Kenaikan pangkat : 1 orang
3. Kenaikan Gaji Berkala : 8 orang
4. Ijin belajar : 0 orang
5. Pegawai pensiun : 1 orang
6. Pegawai mengikuti diklat : 26 orang

D. Kinerja Lain-Lain

KPKNL Tasikmalaya memperoleh penghargaan sebagai Satker Tercepat dalam Penyelesaian Rekonsiliasi Data Keuangan yang Berkualitas Per di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.





Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV Penutup

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai KPKNL Tasikmalaya tahun 2025 ini adalah sebesar 116,31%. Capaian NKO ini merupakan hasil kerja keras seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Tasikmalaya yang berasal dari total 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), 17 (tujuh belas) IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi \geq 100%) dan hanya 1 IKU tersebut berstatus kuning (capaian/realisasi kurang dari 100%), 18 (delapan belas) IKU tersebut yaitu:

1. Indeks integritas
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
3. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
4. Persentase realisasi pokok lelang
5. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
6. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
7. Indeks kepuasan pengguna layanan
8. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan
9. Persentase evaluasi kinerja BMN
10. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara
11. Tingkat kualitas layanan penilaian
12. Persentase produktivitas lelang
13. Indeks kualitas kinerja anggaran
14. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Indeks penanganan permasalahan hukum
17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
18. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan Negara
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satker K/L dalam pengelolaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
 - c. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan penguasaan peraturan pengelolaan BMN melalui kegiatan capacity building, diklat teknis, maupun kegiatan lainnya.

2. Pengurusan piutang Negara
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang;
 - b. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
3. Pelayanan lelang
 - a. Mengintensifkan pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang;
 - b. Meningkatkan kapasitas para Pelelang secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai peraturan/ketentuan lelang;
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelelang secara intensif.
 - d. Sosialisasi layanan permohonan lelang online.
4. Pelayanan penilaian
 - a. Melakukan knowledge sharing dan diskusi internal tentang penilaian untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
 - b. Diklat penyegaran tentang penilaian.
5. Bagian Umum
 - a. Asistensi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada Seksi lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
 - b. Konsultasi pengelolaan DIPA dengan Kanwil Perbendaharaan dan/atau KPPN.
6. Kepatuhan Internal
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal.
7. Hukum dan Informasi
 - a. Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarkan informasi tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun, semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tugas fungsi KPKNL Tasikmalaya kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi cermin dan evaluasi serta diharapkan memacu kinerja organisasi yang lebih baik, dan secara eksternal Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi indikator kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap takeholders. Harapannya adalah masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari eksistensi dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Tasikmalaya.



Lampiran

Format 1 : Formulir Pengukuran Kinerja Unit KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025

Unit Organisasi	:	KPKNL Tasikmalaya
Tahun Anggaran	:	2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	105.29	105.32%	60.62
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	153.16	120%	50.92
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	121.81	120%	43.85
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	92.85	92.85%	33.93
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	120.68	120%	32.31
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	77	98.70	120%	60
		Indeks kepuasan pengguna layanan	74	94.55	120%	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	138.37%	120%	60
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120%	60
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	150.60%	120%	40
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	103.85%	120%	40
		Persentase produktivitas lelang	80%	104.18%	120%	40
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%	40
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125.22	120%	40
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	120%	40
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116.05	116.05%	58.03
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	112.75	120%	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98.85	120%	120

Format 3

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja
(berdasarkan surat KemenPAN RB B/37/AA.01/2025)

No	Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	-	-	-	-	100	105.32	105.32 %
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01 %	100%	153.16	120%
			Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74 %			
			Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL	39.714.000	34.049.900	85,74 %			
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL	39.714.000	34.049.900	85,74 %	100%	121.81	120%
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL	14.092.000	11.313.500	80,28 %			
		Persentase realisasi pokok lelang	Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74 %	100%	92.85	92.85%
			Risalah Lelang	12.271.000	12.269.000	99,98 %			
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01 %	100%	120.68	120%

No	Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	Pelayanan keadilan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74 %	77	98.70	120%
			Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01 %			
		Indeks kepuasan pengguna layanan	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01 %	74	94.55	120%
			Penggalian Potensi Lelang	20.368.000	20.136.000	99,74 %			
			Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL	39.714.000	34.049.900	85,74 %			
			Survei Lapangan dan Penilaian	62.308.000	61.080.451	98,03 %			
Komunikasi Publik dan Kehumasan	14.412.000	12.716.200	88,23 %						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	Rekomendasi BMN berupa Tanah yang disertipikatkan	12.743.000	12.277.500	96,35 %	100%	138.37%	120%
		Persentase evaluasi kinerja BMN	Rekomendasi hasil kajian portofolio aset	22.116.000	19.878.000	89,88 %	100%	120%	120%

No	Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	78.356.000	75.226.000	96,01 %	100%	150.60%	120%
		Tingkat kualitas layanan penilaian	Survei Lapangan dan Penilaian	62.308.000	61.080.451	98,03 %	70%	103.85%	120%
			Rekomendasi Hasil Penilaian - DKPB dan Survei Basis Data Penilaian	18.040.000	17.258.000	95,61 %			
		Persentase produktivitas lelang	Risalah Lelang	12.271.000	12.269.000	99,98 %	80%	104.18%	120%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	Pengelolaan, Keuangan, BMN dan Umum	2.192.566.000	2167552233	98,86 %	100	120	120%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa					100	125.22	120%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai					80%	98%	120%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	Legislasi dan Litigasi	25.344.000	24.127.000	95,20 %	100	116.05	116.05 %
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Komunikasi Publik dan Kehumasan	14.412.000	12.716.200	88,23 %	80	112.75	120%

No	Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
	Sasaran Strategis	IKU	Nama Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10.703.000	10.501.759	98,12 %	80	98.85	120%

Format 2 : Tabel Capaian IKU yang akan digunakan pada narasi Laporan Kinerja (LKj) 2025

K-Wide	Stakeholder Perspective(30%)								
	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya								
	1a-CP Indeks Integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	100	117	117	120	120	105,32	105,32		
Capaian	100	100	100	120	120	105,32	105,32		
Nilai Kinerja	57,58	67,36	67,36	69,09	69,09	60,62	60,62		

K-Wide	Stakeholder Perspective(30%)								
	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya								
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	163,78%	186,99%	186,99%	154,07%	154,07%	153,16%	153,16%		
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
Nilai Kinerja	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91		

K-Wide	Customer Perspective (20%)								
	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	50,00%	60,00%	60,00%	80,00%	80,00%	100,00	100,00	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	333,33 %	92,42 %	92,42 %	92,66 %	92,66 %	121,18%	121,18%		
Capaian	120,00	120,00	120,00	115,83	115,83	120,00	120,00		
Nilai Kinerja	43,85	43,85	43,85	42,32	42,32	43,85	43,85		



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2025 Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA